

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pemerintah membutuhkan anggaran yang akan dialokasikan untuk aktivitas di masa mendatang. Tercapainya realisasi atas anggaran dalam Pemerintah Daerah sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat saat ini, karena masyarakat dapat menilai langsung kinerja dari Pemerintah Daerah tersebut tentang efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggarannya. Untuk mengukur kinerja dan memastikan realisasi dalam pengelolaan APBD, setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Laporan Keuangan yang mencakup anggaran untuk aktivitas di masa mendatang. Laporan ini yang disebut dengan Laporan Realisasi Anggaran yang menunjukkan bahwa kegiatan keuangan pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Sebagai bagian dari tugas pemerintah di bidang keuangan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membantu mengelola aspek keuangan dan aset daerah, yang merupakan tanggung jawab di tingkat Provinsi. BPKAD merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas dalam pengelolaan pajak, keuangan, dan aset daerah di bawah kepemimpinan Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu entitas akuntansi di lingkungan pemerintahn daerah Provinsi Sumatera Barat yang berkewajiban menyelenggarakan

akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Upaya konkrit mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dilingkungan pemerintah, mengharuskan setiap pengelola keuangan negara menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan cakupan yang lebih luas dan tepat waktu. Laporan harus disajikan dalam bentuk Laporan Keuangan yang disusun berdasarkan proses akuntansi dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mencakup PSAP Nomor 2, yang berkaitan dengan Laporan Realisasi Anggaran. Standar ini mengatur bagaimana entitas harus melaporkan realisasi anggaran entitas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggaran adalah instrumen krusial untuk perencanaan dan pengawasan yang efisien dalam jangka pendek di organisasi. Umumnya, anggaran operasional mencakup periode satu tahun, memproyeksikan pendapatan dan pengeluaran yang diantisipasi selama tahun tersebut. Kehadiran anggaran ini memungkinkan manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi operasional dengan membandingkan anggaran yang ditetapkan dengan hasil yang sebenarnya tercapai.

Penilaian terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah tidak bisa langsung dikategorikan sebagai baik atau buruk karena standar penilaian kinerja pemerintah berbeda dengan penilaian kinerja perusahaan. Untuk menganalisis

efisiensi pengelolaan keuangan daerah dari perspektif pengeluaran, digunakan rumus perbandingan antara penerimaan daerah dan belanja rutin. Pengelolaan keuangan daerah dari rasio ini tergolong semakin efisien apabila nilai rasionya semakin kecil.

Keterkaitan antara anggaran dan realisasinya memberi gambaran tentang efisiensi suatu lembaga dalam membuat keputusan terkait anggaran dan pengeluaran selama periode anggaran satu tahun. Melalui analisis yang berfokus pada visualisasi yang mendukung evaluasi kinerja anggaran, kita dapat langsung mengukur besarnya perbedaan antara anggaran belanja yang direncanakan dan jumlah yang sebenarnya digunakan, baik dalam nilai nominal maupun persentase, sesuai dengan apa yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Dari sini, kita dapat melihat tingkat efektivitas dan penyerapan anggaran oleh lembaga selama tahun anggaran berjalan. Analisis Varians Belanja digunakan untuk mengukur kinerja anggaran ini.

Untuk menilai sejauh mana anggaran telah direalisasikan oleh suatu lembaga, dapat dilihat dari kepatuhan terhadap rencana belanja. Dengan mempertimbangkan pertumbuhan belanja, apakah pertumbuhan belanja tersebut konsekuensi dan memiliki dasar yang kuat sehingga layak dipertanggungjawabkan. Kinerja belanja dapat diukur dengan Analisis Pertumbuhan Belanja. Selain itu, Analisis Kesenjangan Belanja juga digunakan untuk menentukan keseimbangan antara jenis belanja, seperti membandingkan rasio belanja operasional terhadap total belanja. Analisis ini membantu memahami bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dengan cara yang paling efektif. Untuk mengukur kinerja anggaran lebih lanjut, rasio efisiensi belanja dapat digunakan untuk mengevaluasi seberapa efisien dan produktif suatu lembaga dalam menggunakan anggarannya. Sehingga memberikan gambaran

tentang seberapa baik lembaga tersebut mengelola sumber daya keuangannya untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Seiring hal tersebut, alasan penulis memilih judul ini berdasarkan tugas BPKAD dalam mengelola anggaran belanja. Adanya kendala mengakibatkan sistem dari penganggaran belanja menjadi kurang efektif akibat acuan yang digunakan untuk penganggaran belum terealisasi dengan baik dengan proses perencanaan anggaran. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk mengambil judul mengenai “**Analisis Laporan Realisasi Anggaran Belanja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Adapun masalah yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja keuangan Belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat?
2. Apakah penggunaan anggaran belanja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat di tahun 2021 dan tahun 2022 telah efisien?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam kegiatan Tugas Akhir ini adalah:

1. Mengetahui kinerja keuangan Belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.

2. Mengetahui penggunaan anggaran belanja pada tahun 2021 dan tahun 2022 apakah telah efisien.
3. Mengetahui kinerja pemerintah daerah apakah sudah menggunakan anggaran belanja secara optimal.

#### 1.4 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat yang didapatkan penulis dalam kegiatan Magang ini adalah:

##### A. Bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Sarana yang memfasilitasi kerjasama antara sektor pemerintahan dengan Lembaga Pendidikan baik dalam aspek akademik maupun non-akademik.

##### B. Bagi Penulis

1. Untuk memberikan pengalaman kerja bagi penulis dalam kegiatan magang.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis mengenai dunia kerja melalui kegiatan magang.
3. Menambah pengetahuan informasi mengenai kinerja keuangan Pendapatan dan Belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk mengetahui kinerja keuangan Belanja daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat.
5. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam praktik lapangan.

## 1.5 Metode Penulisan

### 1. Studi Lapangan (*field research*)

#### a. Metode Observasi

Kegiatan pengumpulan data pelaporan melalui aktivitas pengamatan mengenai objek yang di bahas.

#### b. Metode Interview

Kegiatan pengumpulan data pelaporan yang didapatkan dari wawancara dengan karyawan dan pejabat yang berkepentingan.

### 2. Studi kepustakaan (*library research*)

Yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan dan mempelajari berbagai bahan bacaan yang mencakup buku teks serta bahan-bahan kuliah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas oleh penulis, dan data yang relevan dengan obyek penelitian.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Magang ini terdiri dari lima bab, tiap-tiap bab akan membahas hal-hal sebagai berikut :

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab pendahuluan ini berisikan tentang Latar Belakang penulis dalam memilih judul, Perumusan Masalah, Tujuan Magang, Metode Magang, Tempat dan Waktu Magang, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini menjelaskan tentang teori yang saling berhubungan dan terkait mengenai anggaran, fungsi anggaran, jenis-jenis anggaran, tujuan anggaran,

karakteristik anggaran, manfaat dan fungsi anggaran, faktor dalam penyusunan anggaran, analisis laporan realisasi anggaran, manfaat laporan realisasi anggaran, struktur laporan realisasi anggaran, isi laporan realisasi anggaran, periode pelaporan realisasi anggaran, akuntansi anggaran, akuntansi pendapatan-LRA, akuntansi belanja, analisis varians belanja, analisis pertumbuhan belanja, analisis keserasian belanja, dan rasio efisiensi belanja.

### **BAB III : Gambaran Umum Instansi**

Bab ini berisi gambaran umum BPKAD Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi sejarah ringkas terbentuknya, visi dan misi, logo, struktur organisasi lokasi, tugas dan fungsi instansi tersebut.

### **BAB IV : Pembahasan**

Bab ini berisi pembahasan mengenai analisis laporan realisasi anggaran yaitu informasi laporan realisasi anggaran tahun 2021 dan 2022, analisis pertumbuhan belanja, analisis varians belanja, rasio efisiensi belanja, dan analisis keserasian belanja.

### **BAB V : Penutup**

Pada bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dari laporan yang terkait dengan tujuan pembuatan laporan dan sarana yang dapat diberikan sehingga memberikan pemasukan bagi instansi dan pihak-pihak yang berkepentingan dimasa yang akan datang.

